

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, Shohib. 2014. "Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi: Bukti dari Data Panel Provinsi di Indonesia". Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Amiruddin. 2012. Analisis Pola Pemberantasan korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, h. 026–037.
- Aidt, T. S. 2003. Economic Analysis of Corruption: a Survey. *The Economic Journal*, Vol. 113, h. 632-652.
- Ali, A. M., Isse, H. S. 2003. Determinants of Economic Corruption: a Cross-country Comparison. *Cato Journal*, Vol. 22, No. 3, h. 449-466.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2013a. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2013b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2013c. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2013d. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2012, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014a. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013, Semarang.

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014c. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014d. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014e. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014f. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013, Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014g. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014h. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014i. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014j. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014k. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014l. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014m. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013. Semarang.

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014n. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014o. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014p. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014q. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2014r. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2013. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015c. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015d. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015e. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015f. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014. Semarang.

- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015g. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015h. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015i. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015j. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015k. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015l. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015m. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015n. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015o. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2015p. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2014. Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Jawa Tengah Dalam Angka 2014*, Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2015a. *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/ Kota 2010-2014 Pulau Jawa-Bali Buku 2*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015b. *Jawa Tengah Dalam Angka 2015*, Semarang.

- Di Tella, R., Schargrotsky, E., 2003. The Role of Wages and Auditing During A Crackdown on Corruption in The City of Buenos Aires. *Journal of Law and Economics*, Vol. 46, h. 269-292.
- Dye, K.M., Stapenhurst, R., 1998. Pillars of Integrity: The Importance of Supreme Audit Institutions in Curbing Corruption. *The World Bank*, h. 1-25.
- Fisman, R., Gatti, R., 2002. Decentralization and corruption: evidence across countries. *Journal of Public Economics*, Vol. 83, h. 325–345.
- Gatti, R., 2004. Explaining corruption: are open countries less corrupt?. *Journal of International Development*, Vol. 16, h. 851–861.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Edisi kelima. Semarang: BP Undip.
- Glaeser, E.L., Saks, R.E., 2006. Corruption in America. *Journal of Public Economics*, Vol. 90, h. 1053–1072.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Liu, J., Lin, B., 2012. Government auditing and corruption control : Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, Vol. 5, h. 163-186.
- Mauro, P., 1998. Corruption and The Composition of Government Expenditure. *Journal of Public Economics*, Vol. 69, No. 2, h. 263–279.
- Melo, M.A., Pereira, C., Figueiredo, C.M., 2009. Political and Institutional Checks on Corruption-Explaining the Performance of Brazilian Audit Institutions. *Comparative Political Studies*, Vol. 42, No. 9, h. 1217–1244.
- Olken, B.A., 2007. Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, Vol. 115, No. 2, h. 200–249.
- Pereira, C., Melo, M. A., Figueiredo, C. M. (2009). The Corruption-Enhancing Role of Re-Election Incentives? Counterintuitive Evidence from Brazil's Audit Reports. *Political Research Quarterly*, Vol. 62, No. 4, h. 731-744.
- Pribadi, Erita Setyarini. 2014. "Pengaruh Temuan Ketidapatuhan pada Perundang-Undangan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Terhadap Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012)". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Shleifer, A., Vishny, R. W. 1993. Corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 108, No. 3, h. 599-617.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, h. 1-13.
- Sunu, Gede Gangga Wiweka. 2013. Kompetensi, Independensi, Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Auditor BPK. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5.1, h. 100-111.
- Svensson, J. 2005. Eight Questions about Corruption. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, No. 3, h. 19-42.